

**ANALISIS PROSES ADMINISTRASI PERJALANAN
DINAS DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN MENGGUNAKAN METODE
*WHY-WHY ANALISIS***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**



Oleh:

**MARIA IMMACULATA YOVITA ADVENTY
NIM. 07011181924028**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
MEI 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**ANALISIS PROSES ADMINISTRASI PERJALANAN
DINAS DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN MENGGUNAKAN METODE
*WHY-WHY ANALISIS***

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**

Oleh:

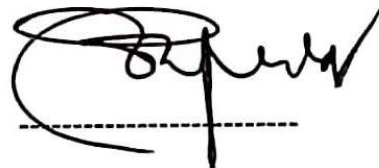
**MARIA IMMACULATA YOVITA ADVENTY
NIM. 07011181924028**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing,

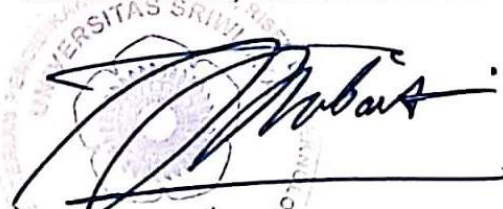
Maret 2023

Pembimbing

**Dr. Raniasa Putra, S. IP, M. Si
197805122002121000**



**Mengetahui,
Ketua Jurusan, Ilmu Administrasi Publik**



**Dr. M. Nur-Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP: 196911101994011001**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“ANALISIS PROSES ADMINISTRASI PERJALANAN
DINAS DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN MENGGUNAKAN METODE
WHY-WHY ANALISIS”**

Skripsi

Oleh :

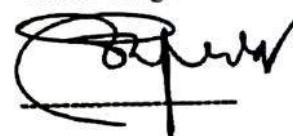
**MARIA IMMACULATA YOVITA ADVENTY
07011181924028**

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 21 Maret 2023**

Pembimbing I

Dr. Raniasa Putra, S. IP, M. Si
197805122002121000

Tanda Tangan



Penguji :

1. Dr. M.Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
196911101994011001
2. Aulia Utami Putri, S.IP., M,Si
199508142019032020

Tanda Tangan



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



**Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004**

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik,



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Immaculata Yovita Adventy

NIM : 07011181924028

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “ Analisis Proses Administrasi Perjalanan Dinas Di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Menggunakan Metode *Why – Why Analysis* “ ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya 08 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Maria Immaculata Yovita Adventy

07011181924028

MOTTODAN PERSEMBAHAN

Tidak semua dari kita bisa melakukan hal-hal besar. Tapi kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar.

^ St. Teresa dari Kalkuta ^

Pekerjaan besar tidak dihasilkan dari kekuatan melainkan oleh ketekunan.

~ Samuel Jonson ~

**Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu,
namun hanya didapatkan oleh mereka yang bersemangat mengejarnya.**

~ Abraham Lincoln ~

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ Kedua Orang Tuaku**
- ❖ Adikku**
- ❖ Seluruh Dosen Pengajarku**
- ❖ Dosen Pembimbingku**
- ❖ Teman-temanku**
- ❖ Almamater**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Proses Administrasi Perjalanan Dinas di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Menggunakan Metode *Why-Why Analisis*” yang mengangkat permasalahan proses administrasi dalam kegiatan perjalanan dinas yang disebabkan adanya ketidaklengkapan bukti dokumen administrasi perjalanan dinas, ketidaklengkapan bukti dokumen administrasi ini berdampak pada pengembalian berkas dibagian keuangan untuk dilakukan pengecekan ulang karena hal ini juga memiliki dampak penolakan laporan pertanggungjawaban oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) karena kegiatan perjalanan dinas ini sangat penting pertanggungjawabannya. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Administrasi dalam Pelaksanaan Kegiatan Perjalanan Dinas di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan Metode *Why – Why Analisis*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Teknik Deskriptif. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah Teori *Root Cause Analisis* oleh Max Ammerman Tahun 1998 yang memberikan penjelasan bahwa untuk menemukan akar permasalahan dengan 5 langkah yaitu mengidentifikasi masalah, menjelaskan yang terjadi, mengidentifikasi faktor penyebab, mengidentifikasi akar penyebab dengan metode *why – why analisis* serta merancang dan menentukan perbaikan. Data penelitian ini diperoleh dari data primer dan hasil wawancara mendalam yang dilakukan terhadap informan atau staf bagian keuangan. Berdasarkan hasil penelitian maka terdapat 3 proses administrasi dalam perjalanan dinas yaitu proses administrasi pelaksanaan perjalanan dinas, proses administrasi pertanggungjawaban dan proses administrasi pembayaran atau pencairan ganti uang. Selain itu juga ditemukan akar permasalahan yaitu pelaksana perjalanan dinas lambat dalam melengkapi berkas pertanggungjawaban dalam kegiatan perjalanan dinas.

Kata Kunci: Proses Administrasi, Perjalanan Dinas, Metode *Root Cause Analisis*, Metode *Why – Why Analisis*

Pembimbing



Dr. Raniasa Putri, S. IP, M. Si
197805122002121000

Indralaya, Maret 2023
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

This study is entitled " Analisis of the Official Travel Administration Process at the Sekretariat of the DPRD of South Sumatra Province Using the Why-Why Analisis Method" which raises the issue of administrative processes in business travel activities caused by incomplete evidence of official travel administration documents, incomplete evidence of administrative documents has an impact on returning files in the financial section to be re-checked because this also has the impact of rejecting the accountability report by the Regional Audit Board of Finance and Assets (BPKAD) because this official travel activity is very important for accountability. This study aims to determine the administrative process in carrying out business travel activities at the Sekretariat of the Regional Representatives Council of South Sumatra Province using the Why – Why Analisis Method. This study uses qualitative methods with descriptive techniques. The theory used in this study is the Theory of Root Cause Analisis by Max Ammerman in 1998 which provides an explanation that to find the root of the problem with 5 steps, namely identifying the problem, explaining what happened, identifying the causal factors, identifying the root causes with the why - why analisis method and design and determine improvements. The research data was obtained from primary data and the results of in-depth interviews conducted with informants or staff in the finance department. Based on the results of the study, there are 3 administrative processes in official travel, namely the administrative process of carrying out official travel, the administrative process of accountability and the administrative process of payment or disbursement of money. In addition, the root of the problem was also found, namely the official travel executors were slow in completing the accountability files in official travel activities.

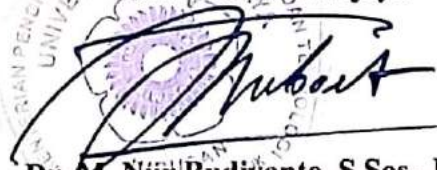
Keywords: Administrative Process, Official Travel, Root Cause Analisis Method, Why – Why Analisis Method

Pembimbing



Dr. Raniasa Putra, S. IP, M. Si
197805122002121000

Indralaya, Maret 2023
Ketua Jurusan, Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. M. Nür Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena berkat dan karunianya-lah penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “Analisis Proses Administrasi Perjalanan Dinas di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Menggunakan Metode *Why-Why Analisis*” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan penelitian ini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof . Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., IPU., ASEAN.Eng, selaku rektor Universitas Sriwijaya yang telah berjasa memfasilitasi kampus sehingga kami dapat berkuliah dengan nyaman.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang sangat berperan dalam penerapan pendidikan.
3. Bapak Dr.M.Nur Budiyanto, S.Sos.Mpa, Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
4. Bapak Dr. Raniasa Putra, S. IP M.Si, yang saya hormati, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta masukan terhadap penulisan skripsi saya.
5. Ibu Annada Nasyaya, S.IP., M.Si, yang saya hormati, selaku Dosen Pembimbing Akademi saya.
6. Ibu Hj.R.A Anita Noeringhati, SH.MH, yang saya hormati, selaku Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
7. Bapak H. Aprizal, S.Ag, SE, M.Si, yang saya hormati, selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Sumatera Selatan sekaligus Kepala Bagian Keuangan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Ibu Sumiati SH., MH, yang saya hormati, selaku Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan di Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Sumatera Selatan.
9. Bapak Hadiyanto SE., M.Si, yang saya hormati, selaku Kepala Sub Bagian Perbendaharaan di Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Sumatera Selatan.
10. Bapak Efri Ardiansyah, SH, yang saya hormati, selaku staf sekaligus informan dalam penelitian, beserta rekan ataupun staf bidang keuangan dan staf umum di Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Sumatera Selatan.

11. Teman-teman seperjuangan fisip unsri: Verren Hertensia Leonardi, Yeni Ariska, Repi Wandira, Aldita Rusmayuni, Indah Monika dan Nopita Harlin.
12. Teman-teman organisasi saya: Ikatan Mahasiswa Belitang Oku Timur, Cogito Fisip Unsri, dan rekan komunitas gereja katolik, yang sudah mengajak saya untuk bertumbuh dalam mengimplementasikan ilmu administrasi publik.
13. Teman – teman dari berbagai jurusan dan universitas yang saya jumpai, terimakasih karena sudah mempersilahkan saya untuk dapat belajar dan saling membagikan pengalaman.

Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Apabila ada kekeliruan dalam penulisan kata, penulis mohon maaf dan menerima saran dan kritik yang membangun. Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, Maret 2023



Maria Immaculata Yovita Adventy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xivi
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori	8
2.2 Konsep Manajemen Publik dan Administrasi Publik.....	8
2.3 Penelitian Terdahulu.....	16
2.4 Kerangka Pemikiran	22
BAB III METODE PENELITIAN	23

3.1 Jenis Penelitian	23
3.2 Definisi Konsep	23
3.3 Fokus Penelitian	25
3.4 Jenis dan Sumber Data	26
3.5 Informan Penelitian	27
3.6 Teknik Pengumpulan Data	29
3.7 Teknik Analisis Data	31
3.8 Keabsahan Data	33
3.9 Jadwal Penelitian	35
3.10 Sistematika Penulisan	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian.....	38
4.2 Deskripsi Responden atau Informan Penelitian	42
4.3 Hasil Penelitian	43
4.4 Pembahasan atau Diskusi..	67
BAB V PENUTUP.....	82
5.1 Kesimpulan.....	82
5.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Penelitian Terdahulu	16
Tabel 2: Kerangka Pemikiran.....	22
Tabel 3: Fokus Penelitian.....	25
Tabel 4: Informan Penelitian.....	29
Tabel 5: Jadwal Penelitian	35
Tabel 6: <i>Why – why Analisis</i> Proses Administrasi Perjalanan Dinas.....	58
Tabel 7: Temuan Penelitian	68
Tabel 8: Temuan dan Hasil Penelitian Proses Administrasi Pelaksanaan Perjalanan Dinas	71
Tabel 9: Temuan dan Hasil Penelitian Proses Administrasi Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Rekap Dokumen Administrasi Perjalanan Dinas	4
Gambar 2: Gedung Sekretariat DPRD Provisi Sumatera Selatan	40
Gambar 3: Bagan Susunan Organisasi	41
Gambar 4: <i>Flowchart</i> Proses Administrasi Pelaksanaan Perjalanan Dinas oleh Pegawai di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	45
Gambar 5: <i>Flowchart</i> Proses Administrasi Pelaksanaan Perjalanan Dinas oleh Anggota Dewan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	47
Gambar 6: <i>Flowchart</i> Proses Administrasi Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	50
Gambar 7: <i>Flowchart</i> Proses Administrasi Pembayaran Ganti Uang di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara, Observasi dan Dokumentasi	88
Lampiran 2: Pedoman <i>Flowchart</i>	93
Lampiran 3: Kartu Bimbingan Skripsi	94
Lampiran 4: Halaman Persetujuan Pembimbing Skripsi	95
Lampiran 5: Lembar Revisi Seminar Proposal	96
Lampiran 6: Surat Izin Penelitian	97
Lampiran 7: Surat Balasan Penelitian	98
Lampiran 8: Surat Tugas	99
Lampiran 9:Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2021	100
Lampiran 10:Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2016	122
Lampiran 11: Rekap Dokumen Administrasi Perjalanan Dinas	151
Lampiran 12: Surat atau Dokumen Administrasi Perjalanan Dinas	161
Lampiran 13:Transkrip Wawancara.....	164
Lampiran 14: Dokumentasi Wawancara.....	173

DAFTAR SINGKATAN

BPKAD	: Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
GU	: Ganti Uang
KABAG	: Kepala Bagian
KBU	: Kabag Keuangan
KKA	: Kuliah Kerja Administrasi
LPJ	: Laporan Pertanggungjawaban
PPTK	: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
SPJ	: Surat Pertanggung Jawaban
SPM	: Surat Perintah Membayar
SPPD	: Surat Perintah Perjalanan Dinas
SPTJB	: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
ST	: Surat Tugas
TU	: Tambah Uang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya manajemen publik merupakan manajemen instansi pemerintah mengenai bagaimana mengatur kepentingan publik atau orang banyak. Dilain sisi untuk mengatur kepentingan tersebut harus mengerti segenap rangkaian pelaksanaan mengenai suatu kegiatan di instansi pemerintah/ atau yang dikenal dengan administrasi. Administrasi merupakan keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan – keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2009:4). Pendapat tersebut memiliki pengertian yang sama dengan yang disampaikan oleh The Liang Gie dalam mendefinisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi juga diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional. Administrasi mempunyai dua dimensi yaitu dimensi karakteristik dan dimensi unsur-unsur (Pasolong 2011:3). Karakteristik yang tidak bisa terpisahkan pada administrasi yaitu efisien, efektif dan rasional sedangkan Unsur-unsur administrasi yaitu: ada tujuan yang dibuat sebelum melaksanakan suatu pekerjaan, adanya kerjasama dengan sekelompok orang atau lembaga pemerintah maupun lembaga swasta dan adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai.

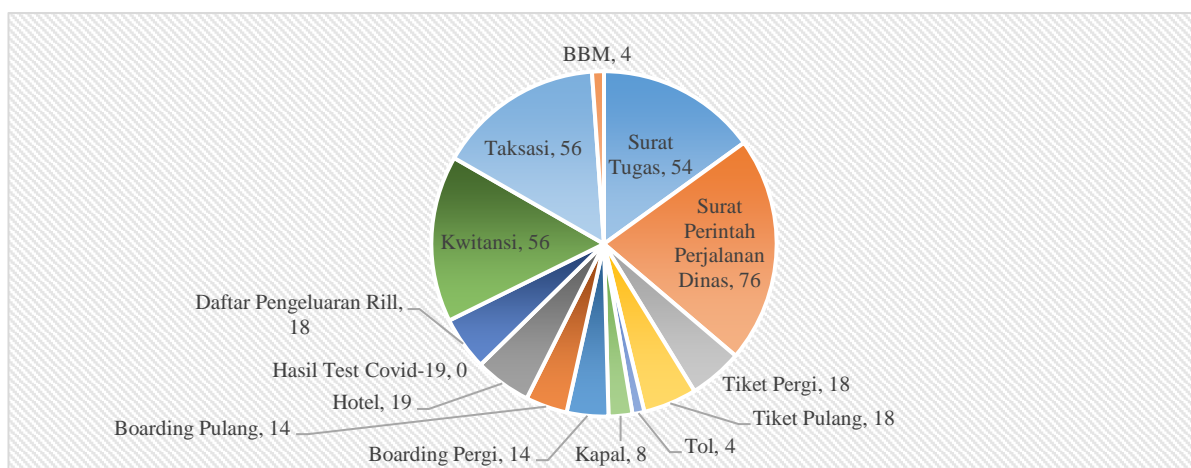
Menurut Nicholas Henry (1988) mendefinisikan administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teoridan praktik dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsive terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik. Administrasi publik diinstansi pemerintah khususnya pada kegiatan perjalanan dinas di Instansi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan atas perintah pimpinan kepada pegawai atau kepada anggota dewan maupun kepada yang diberikan perintah untuk melaksanakan tugas sesuai dengan disposisi oleh atasan untuk melaksanakan tugas kedinasan. Dalam proses administrasi pada kegiatan perjalanan dinas dilakukan oleh anggota dewan dan pegawai, dimana perbedaan keduanya terletak pada cara pengajuan pelaksana perjalanan dinas. Jika perjalanan dinas oleh anggota dewan harus melakukan rapat terlebih dahulu sehingga memperoleh kesimpulan, sedangkan perjalanan dinas oleh pegawai dilakukan atas usulan masing-masing kepala bagian dengan memperoleh nota dinas, setelah proses pengajuan selesai dilakukan maka akan diserahkan kepada Sekretaris Dewan untuk diberikan disposisi, dengan begitu pelaksana akan memperoleh surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yaitu meliputi lamanya perjalanan dinas yang diperintahkan serta terdapat rincian keberangkatan dalam perjalanan dinas dan juga memperoleh surat tugas, kemudian setelah pelaksana melakukan perjalanan dinas tahap administrasi berikutnya yaitu mempertanggungjawabkan bukti perjalanan dinas.

Dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjelaskan adanya prinsip perjalanan dinas dan menjelaskan aturan dalam tahapan administrasi. Prinsip perjalanan dinas yaitu diatur pada bab iii pasal 3, yang menjelaskan bahwa perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, kemudian adanya ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja perjalanan dinas, selanjutnya yaitu prinsip efisiensi penggunaan belanja daerah, dan yang terakhir prinsip akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas. Akuntabilitas yang dimaksud dijelaskan dalam bab ix mengenai pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas yaitu pada pasal 34, yang mengatur bahwa pelaksanaan SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan. Kemudian yang dimaksudkan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan yaitu dengan melampirkan dokumen berupa: Surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPD; SPD yang telah ditanda tangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas; tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya seperti BBM, biaya tol dan tiket penyeberangan; daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang

bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan Bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya.

Dalam Proses Administrasi Perjalanan Dinas, staf-staf pelaksana bagian keuangan sering kali menemukan atau mengalami *problem* yang dapat menghambat kinerja staf tersebut. Masalah Administrasi Perjalanan Dinas yang sering terjadi menurut staf pemeriksa pertanggung jawaban perjalanan dinas antara lain: bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas dikembalikan di bagian keuangan, pengajuan ganti uang ditolak oleh BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan hasil rekap dokumen administrasi ganti uang 3 bagian 2 kegiatan perjalanan dinas tidak lengkap (*Observasi KKA 2022 dan Hasil Wawancara EF 2023*). Masalah diatas disebabkan karena beberapa alasan, salah satunya karena pelaksana perjalanan dinas kurang mematuhi persyaratan dalam pelaporan pembayaran uang perjalanan dinas, seperti yang sudah dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan diatas, atau yang digambarkan oleh grafik dibawah ini.

Gambar 1. Rekap Dokumen Administrasi Perjalanan Dinas (GU 3/ 345- 362)



Sumber: Laporan Kuliah Kerja Administrasi, 2022

Pada grafik rekap administrasi Ganti Uang 3 mulai dari nomer pelaksana 345 – 362 menggambarkan bahwa dalam pelaporan pertanggung jawaban perjalanan dinas belum sesuai dengan yang diharapkan artinya kurang memenuhi kelengkapan pertanggungjawaban dalam proses mengecek bukti perjalanan dinas. Dari 14 macam dokumen yang terekap secara keseluruhan belum memenuhi kelengkapan, karena masih banyak pelaksana yang belum mengumpulkan bukti administrasi pertanggungjawaban, seperti dokumen surat tugas yang terekap yaitu (54) dokumen dari adanya 92 pelaksana perjalanan dinas, kemudian surat perintah perjalanan dinas terdapat (76/92) yang terekap, tiket pergi (18/92), tiket pulang (18/92), tol (4/92), kapal (8/92), boarding pergi (14/92), boarding pulang (14/92), hotel (19/92), hasil test covid-19 (0/92), daftar pengeluaran rill (18/92), kwitansi (56/92), taksasi (56/92) dan bbm (4/92).

Penelitian ini dilakukan untuk memperlihatkan dan memecahkan berbagai *problem* yang terjadi dalam proses administrasi perjalanan dinas tersebut, maka dilakukan penganalisisan menggunakan metode *Why-Why Analisis*, dimana metode ini adalah bagian dari metode *Root Cause Analisis (RCA)* atau Analisis Akar Penyebab. *Why-Why Analisis* digunakan yaitu untuk menggali suatu penyebab dari suatu *problem* yang dilakukan secara lebih dalam dan untuk menemukan solusi atau tindakan. Metode ini merupakan cara sederhana yang bisa digunakan untuk mengatasi atau mengurangi timbulnya masalah dalam proses administrasi perjalanan dinas tersebut. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan Teori Max Ammerman (1998) mengenai metode *Root Cause Analisis* berupa alat analisis “5 *why analisis*” untuk menemukan akar masalah dari permasalahan dalam proses administrasi yaitu pertanggungjawaban dokumen perjalanan dinas. Adapun langkah -

langkah Menurut Teori Max Ammerman tahun 1998 dalam bukunya yang berjudul “*root cause analisis*” yaitu: mengidentifikasi masalah, menjelaskan apa yang terjadi, mengidentifikasi faktor penyebab, mengidentifikasi akar penyebab, merancang dan menentukan rencana perbaikan.

Pada penelitian mengenai perjalanan dinas sudah banyak penelitian mengenai; proses administrasi perjalanan dinas (Widowati, 2019), faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan surat pertanggungjawaban keuangan perjalanan dinas (Waris dkk, 2021), prosedur perjalanan dinas (Susanti, 2021), sistem informasi perjalanan dinas (Lestari 2021, Aryanto 2020, Hakim, 2021, Sahidu dkk 2020, Saputra dkk 2021 dan Nurfarida 2020), penanganan perjalanan dinas (Widiawati, 2017). Penelitian yang memakai metode *Why – Why Analisis* yaitu pada penelitian proses administrasi perjalanan dinas (Widowati, 2019) pada penelitian Widowati berfokus pada sektor swasta. Namun pada penelitian ini berfokus mengkaji metode *Why-Why Analisis* pada badan Legislatif.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan terkait proses administrasi perjalanan dinas di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Proses Administrasi Perjalanan Dinas di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Menggunakan Metode *Why – Why Analisis*.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah pada penelitian ini dalam bentuk *research question* adalah sebagai berikut: Bagaimana Proses Administrasi Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Menggunakan Metode *Why-Why Analisis*?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Proses Administrasi Perjalanan Dinas di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Menggunakan Metode *Why-Why Analisis*.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari pengkajian Proses Administrasi Perjalanan Dinas di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Menggunakan Metode *Why-Why Analisis* adalah:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan Ilmu Administrasi Publik, khususnya mengenai Proses Administrasi Perjalanan Dinas di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan menggunakan metode *Why-Why Analisis*.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam Proses Administrasi Perjalanan Dinas di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adhan, Indra Muchlis. 2013. *Administrasi, Organisasi dan Manajemen*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Ammerman, Max. 1998. *The Root Cause Analisis Handbook*. New York: Productivity Press.
- Dwiyanto, Agus. 2015. *Administrasi Publik: Desentralisasi, Kelembagaan dan Aparatur Sipil Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 2022. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik*: Indralaya.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Gomes, Faustino Cordoso. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi 2. Cetakan ke-Sepuluh*. Yogyakarta: Andi.
- Haryatmoko. 2015. *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mardlasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ohno, Taiichi. 1988. *Toyota Production Sistem Beyond Large - Scale production*. New York: Productivity Press.
- Pasolong, Harbani. 2019. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2020. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Priyono. 2007. *Penghantar Manajemen*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Robbins. Stephen P. 1994. *Teori Organisasi: Struktur, Desain, dan Aplikasi* Jakarta: Arcan.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

Jurnal

- Aryanto, I. K. A. A., Diaz, R. A. N., & Wardana, I. N. K. (2020). Sistem Informasi Pengolahan Surat Perintah Perjalanan Dinas Berbasis Web Studi Kasus di Desa Nyambu. *TIERS Information Technology Journal*, 1(2).
- Anis, M. G., & Selfiana, S. (2021). Penanganan Perjalanan Dinas Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). *Jurnal Administrasi dan Kesekretarisan*, 6(2), 107-123.
- Cahyaningsih, N. W., Rusdiato, D. S., & Brata, K. C. (2019). Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Dan Monitoring Perjalanan Dinas (Studi Kasus: SMK Canda Bhirawa Pare). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer e-ISSN*, 2548, 964X.
- Dharmayanti, L. T., Suprihatin, B., & Hartono, Y. (2020). Inovasi “Jebol” Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 8(2), 71-81.
- Hakim, A. R., Rija’i, T., & Wistira, A. G. (2021, May). Sistem Informasi Perjalanan Dinas Pada Biro Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Berbasis WEB. In *Seri Prosiding Seminar Nasional Dinamika Informatika* (Vol. 5, No. 1).
- Hutabarat, I. S., & Novianti, R. (2022). Peningkatan Semangat Kerja Pegawai Ditinjau dari Aspek Pembagian Kerja pada Pemerintah Kecamatan Sibolga Sambah Kota Sibolga. *AFoSJ-LAS (All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society)*, 2(2), 426-440.
- Ikayanti, H. (2017). Analisis akar masalah (root cause analisis) kecurangan akademik pada saat ujian. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(1).
- Novrizmi, V. D. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset. *Journal Scientific Of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955| p-ISSN 2809-0543*, 3(7), 870-874.
- Sahidu, H. (2020). Sistem Informasi Perjalanan Dinas Berbasis Web Di DP3AP2KB Kabupaten Banggai Kepulauan. *Jurnal Ilmiah Sistem Manajemen Informatika dan Komputerisasi Akuntansi*, 3(2), 5-8.

- Saputra, C., Sulistyanto, A., & Sianipar, A. Z. (2021). Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Surat Perintah Tugas (Spt) Melaksanakan Perjalanan Dinas Berbasis Web Pada Biro Kepegawaian Dan Organisasi Kementerian Perhubungan. *Journal of Information Sistem, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(2), 531-538.
- Susanti, N., Susanti, I. D., Janah, Y., & Waru, A. P. D. T. (2021). Pelaksanaan Prosedur Perjalanan Dinas Bagi Pegawai PT. ASABRI (Persero) Jakarta. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1(1), 28-32.
- Soesanto, S., & Haryanto, H. (2021). Analisis Sistem Akuntansi Pengelolaan Uang Perjalanan Dinas Di Inspektorat Iv Itjen Kemendikbudristek Ri. *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 2(2), 25-37.
- Widiawati, K. (2017). Tinjauan Job Description Hr-Ga Manager Dalam Menangani Perjalanan Dinas Managing Director Ke Luar Negeri Di Pt Bridon Cibitung–Bekasi. *Jurnal Administrasi dan Kesekretarisan*, 2(2), 161-183.
- Widowati, I., & Purwanto, D. (2019). Analisa Proses Administrasi Perjalanan Dinas Karyawan Pt. Xyz Menggunakan Metode Why-Why Analisis. *Jurnal Teknologika*, 9(1).
- Yunus, A. A. W., & Ismail, I. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Surat Peratanggung Jawaban Keuangan Perjalanan Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Wajo. *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration*, 2(2), 625-636.

Peraturan Perundang – Undangan

- Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 239 / KPTS / BPKAD / 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 229 / KPTS / BPKAD / 2021 Tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.